

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik dijelaskan merupakan cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan (Maran dalam Susilo, 2003:4). Dunia politik kerap kali menghadirkan pergulatan yang cukup menguras energi baik para politisi yang terlibat langsung maupun pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat di dalamnya. Tidak hanya masyarakat secara personal, institusi kemasyarakatan (organisasi) yang bergerak di luar politik juga terkena dampaknya. Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab (Schei, 2009:23) .

Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, Berdasarkan Khittah Muhammadiyah tentang politik, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nashier menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan kekuatan politik mana pun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut "khittah" (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini (Haidar Nashier, 2008) .

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang (Makasar), Muhammadiyah menyatakan sikap untuk netral terhadap partai politik manapun yang mengikuti pemilihan umum. Sikap netral terhadap partai politik bertujuan untuk menghindari konflik yang nantinya bisa merugikan Muhammadiyah, dikarenakan Muhammadiyah tidak bergerak dalam ranah politik praksis. Jika partai politik mempunyai sikap pragmatis, Muhammadiyah memiliki tujuan yang lebih luas yakni membangun umat. Akan tetapi sikap netral Muhammadiyah, secara organisasi maupun pribadi bukan berarti Muhammadiyah anti politik, karena bagaimanapun Muhammadiyah pasti akan terlibat dan terus bermain dalam kancah perpolitikan baik nasional maupun lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung (Setiawan, 2013: 38-46).

Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dan juga sudah berumur tua, usia Muhammadiyah bahkan melebihi usia negara Indonesia yang baru berdiri tahun 1945. Muhammadiyah adalah suatu gerakan sosial Islam yang bergerak terutama dalam bidang dakwah tetapi bersifat multiwajah, dikarenakan aktifitasnya tidak hanya meliputi dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi saja. Akan tetapi juga ikut berkontribusi penting dalam wilayah politik kenegaraan. Seperti dalam kiprah di bidang yang lain, Muhammadiyah juga tidak pernah absen dari kiprah politik. Hanya saja, wajah politik yang ditampilkan itu berbeda, seiring dinamika politik yang terjadi, terutama dipengaruhi oleh rezim berkuasa (Syarifuddin Jurdi, 2010).

Muhammadiyah memberi dukungan kepada kadernya. Dukungan ini merupakan kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai contoh Amien Rais yang merupakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), menjadikan PAN sebagai kendaraan untuk berjuang di ranah politik. Pencalonan Amien Rais melalui kendaraan Partai Amanat Nasional (PAN) menuai kendala karena harus memenuhi perolehan suara dalam pemilu legislatif sesuai ketentuan Undang-Undang Pilpres. Oleh sebab itu Muhammadiyah merasa memiliki kewajiban memberi dukungan kepada kadernya, dukungan ini juga merupakan wujud kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, secara tidak langsung PAN memperoleh rekomendasi dan legitimasi sebagai partai pilihan utama warga Muhammadiyah (Syarifuddin Jurdi, 2010).

Sejarah berdirinya PAN tidak terlepas dari hasil Tanwir Muhammadiyah di Semarang, April 1998. Pada tanggal 5-7 Juli 1998 telah dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah yang bertempat di Semarang, yang dimana dihadiri oleh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan tingkat wilayah (Provinsi) se-Indonesia. Dalam Tanwir tersebut, point penting yang menjadi keputusan adalah agar Muhammadiyah mendirikan partai sebagai aspirasi bagi warganya. Namun, dalam keputusan resmi dinyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi partai politik, akan tetapi warga Muhammadiyah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk terlibat dalam partai politik sesuai dengan minat dan potensinya atas dasar pribadi bukan Muhammadiyah. Salah satu partai yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah Dr. H Amien Rais yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). PAN mempunyai visi yang sangat tinggi untuk membela kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada Platform Partai Amanat Nasional

(PAN) bagian C bahwa visi Partai Amanat Nasional adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih, di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam (AD/ART PAN, pasal 4)

Persoalan hubungan Muhammadiyah dengan politik memang selalu memunculkan dinamika tersendiri. Proses pemilihan Kepala Daerah juga menimbulkan perilaku dan sikap yang beragam. Keberagaman pilihan politik memunculkan tarik ulur antara kepentingan politik personal, warga dan elitnya. Kecenderungan menarik lembaga Muhammadiyah untuk terjun langsung atau tetap pada posisi gerakan Islam menjadi tarik ulur antara dua kepentingan tersebut (Mukhlis, 2015: 21-22).

Pada bulan Mei, Menjelang Pilgub Jateng 2018, Tokoh Muhammadiyah dan mantan ketua MPR yaitu DR H Amien Rais yang menyempatkan ikut menyemarakkan kegiatan Gebyar Hari Bermuhammadiyah dalam gelaran Pengajian Akbar di Lapangan Desa Reco, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang diadakan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) tersebut, menghadirkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1995-1998 DR H Amien Rais. Dalam kesempatan itu, Amien Rais didampingi putra ketiganya, Ahmad Mumtaz Rais beserta istri.

*"Penting warga Muhammadiyah berjihad politik agar warga Muhammadiyah lebih memahami lagi tentang permasalahan politik yang ada," ujar beliau.*

Mantan Ketua MPR itu mengharapkan, dengan jihad politik tersebut pada akhirnya warga Muhammadiyah akan lebih bijaksana dalam ikut menentukan dan memilih seorang pemimpin. Senada, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Bambang Wen juga memberikan apresiasi kepada pemuda Muhammadiyah yang sukses menggelar kegiatan dengan menghadirkan tokoh nasional seperti mantan Ketua MPR RI tersebut. "Ini sangat bagus sekali agar silaturahmi antarwarga Muhammadiyah terus terjalin dan bisa bertemu dengan tokoh nasional Muhammadiyah," tutur dia (<https://www.suamerdeka.com>. 12/11/2018).

Pada perhelatan pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, juga memberikan daya tarik bagi Muhammadiyah dalam memberikan sikap sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai massa. Di lain sisi partai yang berdiri dari tokoh Muhammadiyah yaitu Partai Amanat Nasional, resmi memberikan dukungan kepada calon gubernur (cagub) Sudirman Said dalam Pilgub Jateng 2018. Bentuk dukungan ditandai dengan pemberian surat rekomendasi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Sudirman Said di Rakerwil II di Kyriad Grand Master Hotel Grobogan. SK yang diserahkan merupakan bentuk rekomendasi PAN kepada Sudirman Said. (Akrom Hazami, PAN resmi dukung sudirman said maju pilgub jateng 2018, <https://news.detik.com>, 01/04/2018).

Melihat beberapa persoalan tersebut, sikap politik dan peran Muhammadiyah didalam menghadapi Pemilihan Umum mengindikasikan adanya keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung didalam politik. Dalam penelitian ini berfokus pada Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo. Peran Muhammadiyah secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, yang dalam prosesnya ada peranan dari para kader Muhammadiyah yang terjun dalam dunia politik dan juga masyarakat yang merasakannya. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan **Peran Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo.
2. Bagaimana gerak langkah Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis menetapkan tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana gerak langkah Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo tahun 2018

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersebut antara lain:

1. Dapat memberikan pengetahuan terkait gerak langkah dan peran Muhammadiyah dalam dunia politik.
2. Dapat menjadi wawasan pendidikan politik praksis tentang peran dan keterlibatan Muhammadiyah dalam dunia politik

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Peran Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Dalam upaya mengembangkan dan menyempurnakan penelitian perlu adanya dilakukan tinjauan pustaka. Antara lain yaitu:

1. Buku yang ditulis oleh (Syarifuddin Jurdi, 2010). Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 1996- 2006 . Buku ini membahas tentang Buku yang terdiri dari lima bab ini diangkat dari disertasi Syarifuddin Jurdi, disusun secara sistematis mengupas dinamika politik Muhammadiyah mulai tahun 1966 sampai 1998, melewati dua periode politik Orde Baru dan pasca Orde Baru (reformasi). Dinamika politik internal Muhammadiyah tersaji begitu mendalam melalui analisis yang akurat. Data yang diungkap juga cukup kuat mendukung analisis, dan berhasil mendiskripsikan dinamika politik Muhammadiyah dalam merespon dinamika politik di Indonesia secara utuh dan mendetail dalam setiap perkembangan yang terjadi. Kehadiran buku ini cukup memberi referensi bagi peminat kajian kemuhammadiyah, khususnya tentang kiprah Muhammadiyah di bidang politik kebangsaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nispul Khoiri (2013). Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah. Penelitian ini membahas tentang Peran Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia memberikan peran dan kiprah yang besar terhadap negeri ini. Meskipun Muhammadiyah adalah perserikatan pada posisi netral tidak berpolitik praktis, tetapi Muhammadiyah mampu memotivasi, mensupport bahkan mempreseur pemikiran politiknya dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik hukum Islam, seperti proses legislasi di Parlemen dan mengambil kebijakan pemerintah. Perundang-undangan (legislasi) merupakan bagian tugas pemerintah, dengan tujuan menciptakan

ketenteraman, kebaikan dan keadilan masyarakat. Bila Undang-undang yang dilegislasikan itu berasal dari Hukum Islam, sudah tentu kekuatannya mengikat berdasarkan Hukum Islam tersebut. Kendati demikian peran politik Muhammadiyah dalam beberapa hal dilakukan oleh para elitnya memberikan efek positif terhadap pemikiran politik Muhammadiyah itu sendiri, termasuk dalam hal bidang politik hukum Islamnya. Muhammadiyah mampu mengawal proses legislasi di Parlemen. Muhammadiyah turut serta memotivasi beberapa legislasi yang mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2015), dalam penelitiannya tentang “Perilaku Politik Elit Keagamaan Dalam Politik Lokal” memaparkan varian perilaku elit Muhammadiyah terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Banyuwangi. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Muhammadiyah dalam membaca persoalan politik lokal, berpijak pada dokumen kepribadian Muhammadiyah yang didalamnya terdapat panduan ideologis dalam menghadapi situasi politik. Dengan demikian para elit Muhammadiyah terkadang memiliki kepentingan pragmatis masing-masing. Oleh karena itu, diantara elit yang satu dengan yang lain memiliki pilihan politik yang berbeda. Namun, perbedaan politik itu jelas dalam koridor etis pilihan rasional dan nilai-nilai moral Muhammadiyah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013), dalam jurnalnya tentang “Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik Nasional Pasca Orde Baru Tahun 1998-2010’ menjelaskan bahwa Muhammadiyah

memposisikan lebih sebagai kelompok kepentingan sekaligus gerakan sosial keagamaan yang nonpolitik dan tidak memasuki dunia politik praktis, meskipun dalam perkembangannya memiliki keterlibatan tertentu dengan partai politik dan dalam batas tertentu aktif dalam kegiatan politik praktis. Politik praktis yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan politik yang bersifat langsung dalam perjuangan kekuasaan untuk memperebutkan posisi politik pemerintahan.

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan sekaligus gerakan sosial keagamaan dengan menampilkan wujud Islam kultural lebih memilih bergerak dalam lapangan tabligh, pendidikan, dan pembinaan kesejahteraan sosial melalui amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan sifat pembaharuannya, Muhammadiyah menjadi golongan yang sadar akan kemajuan tetapi konservatif dalam mempertahankan kepribadiannya. Sikap dasar Muhammadiyah yang lebih banyak memainkan fungsi politik tidak langsung dengan melakukan lobbying dan pendekatan-pendekatan.

Sikap politik Muhammadiyah yang akomodatif menjadi pilihan karena menjauhi konfrontasi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip gerakannya. Kecenderungan politik yang demikian mencerminkan sikap yang lunak dalam berdakwah secara struktural, ruang dialog yang terbuka dengan penguasa, membuat nilai tawar Muhammadiyah diperhitungkan tanpa terperangkap dalam kekuasaan. Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang merupakan bentuk dari eksistensi Muhammadiyah dan keberadaannya sangat penting untuk membantu pemerintah dan bukan menjadi pesaing dari

pemerintah, antara pemerintah dan Muhammadiyah berjalan beriringan dan saling membantu guna mencapai tujuan bersama.

Dalam tinjauan pustaka yang diterangkan secara singkat dan jelas diatas, dapat diketahui tentang Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam dunia politik. Untuk tinjauan pustaka yang diatas menjelaskan tentang berbagai sudut pandang terhadap peran Muhammadiyah dalam dunia politik. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang peran atau sikap Muhammadiyah dan bagaimana eksistensi seorang kader Muhammadiyah dalam dunia politik.

Melihat pembahasan singkat dari 4 penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, persamaan yang didapat dari penelitian terdahulu dilihat dari Peran Muhammadiyah dalam dunia politik. Perbedaaan dengan riset yang ditulis oleh penulis adalah obyek penelitian pada Muhammadiyah dalam dunia politik di Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini penulis meneliti Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Wonosobo. Tentang bagaimana Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo yang mempunyai massa dalam ruang lingkup organisasinya berperan saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Apakah Muhammadiyah berpartisipasi dalam partai politik di Kabupaten Wonosobo. Serta apakah Muhammadiyah mempunyai eksistensi dan peran yang berpengaruh dalam ruang lingkup sosial masyarakat dalam menyikapi pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo. Ini

menjadi suatu hal yang bisa dikembangkan dalam pendidikan politik praksis, karena jika dilihat secara umum organisasi agama dan politik adalah dua hal yang berbeda. Maka harus bisa dijelaskan arah gerak Muhammadiyah dalam keterlibatannya di dunia politik melalui tokoh dari Muhammadiyah dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

#### **F. Kerangka Dasar Teori**

Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus mempunyai dasar teori sebagai landasan peneliti sebagai acuan untuk penguat argumentasi atau indikator dari penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

##### **1. Peran**

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Para peneliti telah mendefinisikan peran dari berbagai macam sudut pandang. Menurut Dougherty & Pritchard dalam Bauer (2003 : 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran dapat melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu tergantung bagaimana penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi.

Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas oleh Scott et al. dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan aspek penting dari peran, Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity), peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

## 2. Organisasi Masyarakat

Ada beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi. Diantaranya adalah pendapat dari Schei (1982) dalam komunikasi organisasi (2009:23), organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Wright (1977), mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk system terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dikatakan merupakan suatu system karena organisasi itu terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Setiap

organisasi memerlukan koordinasi supaya masing-masing bagian dari organisasi bekerja menurut semestinya dan tidak mengganggu bagian lainnya. Tanpa koordinasi sulitlah organisasi itu berfungsi dengan baik. Tiap organisasi pun mempunyai aktivitasnya masing-masing sesuai dengan jenis organisasinya.

Setelah kita mengetahui apa itu organisasi, mari kita lihat bagaimana peran organisasi dalam atau untuk masyarakat. Muhammadiyah adalah Organisasi Masyarakat berbasis Islam mempunyai peran yang penting untuk memajukan Islam itu sendiri. Semua akan berjalan dengan baik dan benar jika para pemeran yang terlibat dalam suatu organisasi tersebut dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dibentuknya dengan bertujuan untuk menegakan amar m a'ruf nahi mungkar. Dengan mengesampingkan semua urusan pribadi organisasi-organisasi yang mempunyai perbedaan. Karena, tentunya dalam pembentukan suatu organisasi atau ormas-ormas tertentu, pastinya punya tujuan yang berbedan serta perbedaan pendapat yang berbeda pula.

### 3. Politik

Para ahli menyikapi politik dengan berbagai pendapat, Joyce Mitchel dalam (Philipus (2004:92) memaparkan bahwa politik adalah pengambilan keputusan secara kolektif atau pembuatan kebijakan umum yang digunakan untuk seluruh masyarakat. Sedangkan menurut David Easton dalam Philipus (2004:90) mendefinisikan politik adalah semua aktifitas yang mempunyai

pengaruh dengan suatu kebijakan yang dilakukan. Kemudian dipertegas dalam pernyataan Maran dalam Susilo (2003:4) mengatakan bahwasanya politik adalah studi khusus tentang bagaimana cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah yang lainnya. Dengan kata lain merupakan bermacam-macam kegiatan dalam sistem pemerintahan atau negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuannya.

Kemudian menurut Selo Soemardjan (1998:26-27) memaparkan bahwasanya budaya politik dapat dilihat secara umum dari dua segi, yaitu masalah objektivitas dengan subjektivitas dalam studi ilmiah yang mempertanyakan tentang bagaimana peranan ideologi prasangka atau praduga dalam usaha mencari kebenaran dan masalah peranan ideologi dalam proses politik yang sesungguhnya terjadi di suatu masyarakat. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik juga merupakan kegiatan tentang segala sesuatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

### **G. Definisi Konseptual**

Fokus penelitian ini adalah Peran Muhammadiyah Sebagai Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo. maka definisi konseptual penelitian ini adalah:

### 1. Peran

Teori terkait pengertian peran dalam penelitian ini menurut peneliti yaitu peran merupakan kedudukan dari status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran tidak hanya meliputi secara personal, akan tetapi juga secara organisasi yang mencakup masyarakat.

### 2. Organisasi Masyarakat

Teori Terkait Organisasi Masyarakat dalam penelitian ini menurut peneliti organisasi adalah suatu koordinasi dari dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasinya dalam ruang lingkup masyarakat organisasi tersebut. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam memiliki pengaruh besar untuk masyarakat dan pemimpin yang berkaitan.

### 3. Politik

Teori terkait politik dalam penelitian dalam penelitian ini menurut peneliti adalah segala bentuk kegiatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan bersama dengan masalah lainnya. Dengan kata lain dalam pemerintahan politik dilakukan harus meliputi semua aspek yang berkaitan dengan permasalahan agar dapat diselesaikan dengan bersama-sama.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran variabel penelitian tersebut. Adapun definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Definisi Konsep dan Operasional

No	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Instrumen	K/W
1	Peran	a. Hak b. Kewajiban	1. Memilih 2. Peran Organisasi 3. Kewajiban 4. Kader Muhammadiyah	K1/ W1 K2/ W2 K3/ W4 K4/ W4
2	Organisasi Masyarakat (Muhammadiyah)	a. Amar Ma'ruf b. Nahi Munkar	5. Pemimpin baik (amar ma'ruf) 6. Pemimpin jujur 7. Korupsi 8. Kritik	K5/ W6 K6/ W6 K7/ W7 K8. W8
3.	Politik	a. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 b. Pemecahan masalah	9. Partisipasi 10. Partai politik Gubernur Terpilih 12. Kontribusi Muhammadiyah	K9/ W9 K10/ W10 K11/ W11 K12/ W12

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, yang dilakukan sebagai menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintergrasikan data ditempat penelitian secara objektif. Untuk mendapatkan data yang tepat sesuai apa yang diinginkan maka akan digunakan survei sebagai pengambilan data ke responden Kader Muhammadiyah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Moleong (2017) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan secara kualitatif diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadi di lapangan. Penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan agar bisa mendeskripsikan data-data yang dapat dari Kader Muhammadiyah dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, yang mengetahui peran Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo, adapun alasan mengapa memilih lokasi tersebut. Karena Kabupaten Wonosobo adalah lokasi dimana peneliti meneliti subyek penelitian yang mengetahui peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018. Sehingga membuat peneliti memilih lokasi tersebut dijadikan tempat untuk penelitian.

### 3. Unit Analisa

Unit analisa penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo serta masyarakat Kabupaten Wonosobo, Serta untuk mendeskripsikan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam dunia politik di Kabupaten Wonosobo, maka perlu adanya informasi dari pihak Organisasi selaku pelaksana dan masyarakat yang merasakan bagaimana Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo.

## **J. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Kuesioner (Purposive Sampling)

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orang tua/ anak yang ingin diselidiki (Bimo Walgito, 2010:72). Angket ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan angket ini responden mudah memberikan jawaban karena alternatif jawaban sudah disediakan dan membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya. Teknik pengambilan kuesioner menggunakan purposive sampling.

Purposive Sampling pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010) .

Langkah dalam menerapkan teknik ini adalah sebagai berikut:

1. Tentukan kriteria-kriteria untuk sampel.
2. Tentukan jumlah sampel berdasarkan studi kasus yang diteliti.
3. Tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria.

Setiap tingkat jawaban kuesioner penulis berikan jawaban bertingkat, akan tetapi tidak memberikan bobot pada setiap tingkat jawaban, karena penulis hanya menghitung beberapa banyak sample responden yang memiliki tingkat jawaban tersebut. Tingkat jawaban antara lain adalah

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. biasa saja
- d. kurang setuju
- e. tidak setuju sama sekali

Sebagai lanjutan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana mereka memberikan kontribusi melalui tingkat jawaban dalam kuesioner di atas.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan terkait dengan menggali informasi secara mendalam ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo dan

masyarakat Wonosobo, yang menjadi narasumber untuk mengetahui informasi tentang Peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo.

### 3. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2006:124), observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Observasi dilakukan untuk mencatat seluruh kegiatan dan pengamatan penulis selama penelitian peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo, maka akan dilakukan observasi menyeluruh.

## **K. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif sedangkan sumber data antara lain:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara yang didapat dari narasumber atau informan yang mempunyai potensi dalam memberikan suatu informasi. Data primer sifatnya sangat subyektif karena berdasarkan pendapat pribadi

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk menganalisa data yang ditentukan. Data sekunder sifatnya lebih obyektif, karena sudah diolah oleh pihak ketiga yang dikumpulkan oleh peneliti melalui jurnal, karangan ilmiah dan lembaga hukum.

### 3. Responden

Responden adalah subyek penelitian yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun responden yang penulis ambil adalah sebagai mana tabel berikut dibawah ini.

Tabel 1.2 Responden

No	Responden	Jumlah
1.	a. Kader Muhammadiyah Wonosobo	15
2.	Masyarakat	
	a. Guru	10
	b. Mahasiswa	10
	c. Pedagang	10
3	Jumlah keseluruhan	45

Pengambilan sampel (Purposive Sampling), sebagai responden penulis sesuaikan dengan maksud penelitian ini yaitu untuk mengimbangi para Kader Muhammadiyah Wonosobo. Penulis mengambil sampel guru, mahasiswa, dan pedagang. Sedangkan untuk Muhammadiyah tetapkan secara seimbang Kader Muhammadiyah Wonosobo.

## **L. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini empat komponen analisis antara lain, yang pertama ada pengumpulan data, kedua reduksi data dan ketiga penyajian data selanjutnya penarikan kesimpulan. Menurut Moelong (2004;280-281), “Analisis data adalah suatu proses yang mengurutkan antara pola, kategori dan satuan uraian dasar, hal tersebut dapat menemukan tema dan tempat sebagai dirumuskannya hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Beberapa langkah-langkah analisis data Menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan pada pengumpulan data harus menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat sebagai data yang relevan dan menentukan suatu fokus serta pendalaman data pada.
2. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang belum diolah dari lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, maka demikian dari reduksi data dimulai sejak penili telah memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis seperti jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap dengan apa yang diteliti langsung di tempat lapngan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.